

Date Received : June 2025  
Date Revised : June 2025  
Date Accepted : June 2025  
Date Published : July 2025

---

## KETERLIBATAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENTANG MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGRI 26 MEDAN

**Nurroyian<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (nurroyyian@gmail.com)

**Rustam**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (rustam\_pakpahan@uinsu.ac.id)

---

### **Kata Kunci:**

Keterlibatan, Komite,  
Sekolah

---

### **ABSTRACT**

Komite sekolah memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, namun implementasi perannya di lapangan masih sering menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu dan kurangnya komunikasi antara sekolah, komite, dan wali murid. Hal ini menghambat efektivitas komite dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya partisipasi dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan terkait mutu pendidikan di SMP Negeri 26. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah terlibat dalam tahap perencanaan, namun peran tersebut belum maksimal pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Faktor internal seperti kesibukan anggota dan minimnya koordinasi menjadi penghambat utama. Selain itu, kurangnya kejelasan tugas komite juga berdampak pada efektivitasnya dalam mendukung mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pihak sekolah dan komite melalui komunikasi yang lebih intensif dan sistem koordinasi yang terstruktur.

---

---

<sup>1</sup> Correspondence author

## A. PENDAHULUAN

Komite sekolah adalah lembaga independen yang terdiri dari orang tua atau wali siswa, masyarakat umum, serta komunitas sekolah yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan. Keberadaan komite ini bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan, memberikan dukungan serta arahan bagi seluruh elemen di satuan pendidikan, dan menjalankan fungsi pengawasan selama proses pendidikan berlangsung. Pembentukan komite sekolah atau madrasah juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan proses pembelajaran, mengurangi ketergantungan terhadap intervensi pemerintah yang terlalu dominan, sehingga mendorong peserta didik menjadi lebih mandiri dalam menghadapi permasalahan.

Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, komite sekolah memiliki anggota yang berasal dari orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, dan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Komite ini memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya dengan turut serta dalam memberikan persetujuan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan sekolah. Jika peran ini dilaksanakan secara optimal, maka akan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan dan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan, keanggotaan komite sekolah terdiri dari: orang tua siswa aktif maksimal 50%, tokoh masyarakat maksimal 30%, dan pakar pendidikan maksimal 30% (Nursanti et al., 2020).

Peran strategis komite sekolah terlihat dalam dukungannya terhadap pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Sebagai mitra kerja sekolah, komite memiliki fungsi untuk membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program pendidikan. Keterlibatan aktif komite menjadi indikator partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Dukungan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk ide atau gagasan, tetapi juga dapat berupa dukungan finansial dan sosial, yang sangat penting untuk kelangsungan kegiatan akademik maupun nonakademik di sekolah.

Secara empiris data di lapangan keterlibatan aktif komite sekolah sering menghadapi tantangan, salah satunya adalah masalah waktu dan kurangnya komunikasi antara sekolah, komite sekolah dan wali murid. Banyak anggota komite, yang umumnya merupakan orang tua atau wali siswa, memiliki kesibukan atau tanggung jawab lain di luar sekolah, seperti pekerjaan atau urusan pribadi. Akibatnya, waktu yang disediakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan komite sering kali bertabrakan dengan agenda pribadi atau kegiatan lain di sekolah. Masalah ini dapat berdampak pada kelancaran koordinasi dan pelaksanaan program-program komite. Rapat atau kegiatan yang dirancang oleh komite sekolah terkadang tidak dapat dihadiri oleh sebagian besar anggotanya karena jadwal yang berbenturan. Kondisi ini memengaruhi efektivitas kerja komite dalam mendukung program sekolah secara optimal, upaya peningkatan kualitas layanan di lingkungan sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru, tetapi juga menuntut adanya peran serta masyarakat secara nyata. Dalam konteks ini, komite sekolah hadir sebagai wadah partisipasi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan komite sekolah dalam berbagai keputusan penting, seperti perencanaan program, evaluasi mutu, hingga pengawasan

anggaran, dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan yang dihasilkan.

Penelitian ini selaras dengan fokus pembahasan yang menelaah peran serta keterlibatan komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan. Komite sekolah berfungsi sebagai lembaga yang memiliki empat peran utama, yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung kegiatan sekolah (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), serta sebagai jembatan komunikasi (mediator) antara pihak sekolah dan masyarakat (Rosnani, 2021). Meskipun terdapat ketidakefektifan komite dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, hal ini tidak secara langsung menurunkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sistem pendidikan di sekolah tersebut yang bersifat otopoietik, yaitu dapat memperbaiki dan menyesuaikan diri ketika salah satu atau beberapa bagian dari sistem mengalami gangguan. Partisipasi masyarakat juga diperluas melalui berbagai aspek, seperti pengadaan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (Irawan et al., 2021).

Di SDN Blimbing 4 Malang, keberadaan komite sekolah menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan sekolah guna mendorong peningkatan mutu pendidikan. Beberapa faktor yang menjadi kekuatan komite sekolah antara lain: (a) keterlibatan aktif dalam program-program sekolah, (b) kemampuan merespons permasalahan dengan cepat, (c) pembagian tugas yang jelas di antara pengurus yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta perwakilan dari paguyuban kelas, dan (d) terjalinnnya koordinasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, dan pengurus komite (Septiana et al., 2018).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana komite sekolah dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan waktu yang sering berbenturan dengan agenda sekolah. Selain itu, kurangnya komunikasi antara pihak sekolah, wali murid, dan komite juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang efektif, baik melalui penyusunan kebijakan maupun penjadwalan yang lebih fleksibel, agar seluruh anggota komite tetap dapat berkontribusi secara optimal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab lainnya. Dengan demikian, peran komite sekolah dapat tetap berjalan maksimal di tengah keterbatasan yang ada.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tertentu dan berada di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan terkait mutu pendidikan. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses keterlibatan tersebut, tidak hanya sekadar mencari jawaban pasti, tetapi juga menggali pengalaman, peran, dan dinamika yang muncul dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 26 Medan yang berlokasi di Blok P, Jalan Pulau Sicanang No.17, Belawan Bahagia, Kota Medan Belawan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui

wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan anggota komite sekolah, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen, seperti notulen rapat.

Dalam pengumpulan data, digunakan teknik wawancara dan observasi, sementara analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi digunakan untuk mengevaluasi kredibilitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, menggunakan beragam metode, dan dilakukan dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2012). Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian informasi antar narasumber, triangulasi metode menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk meningkatkan akurasi, dan triangulasi teori melibatkan berbagai sudut pandang analitis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan objektivitas dan validitas hasil penelitian, serta memastikan bahwa data mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan hasil observasi langsung serta wawancara mendalam dengan kepala sekolah, ketua komite, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 26 Medan, diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai peran penting komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan terkait peningkatan mutu pendidikan. Hasil temuan menunjukkan bahwa komite sekolah tidak sekadar berperan sebagai lembaga formalitas, melainkan benar-benar menjalankan fungsi sebagai mitra aktif dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang melibatkan partisipasi, menjunjung transparansi, dan akuntabilitas. Pihak sekolah mengungkapkan bahwa komite secara nyata berperan dalam sejumlah kegiatan strategis, seperti penyusunan program pembelajaran, evaluasi terhadap kinerja sekolah, pengelolaan anggaran, hingga penanganan berbagai persoalan sosial yang dihadapi siswa. Dalam pelaksanaan rapat-rapat sekolah, komite selalu diundang dan diberi ruang untuk memberikan masukan. Walaupun komite tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan final dalam kebijakan sekolah, masukan mereka sering dijadikan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan oleh manajemen sekolah.

Kepala sekolah menekankan “komite sekolah sangat berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi pihak komite tidak bisa memutuskan keputusan apa yang diusulkan yang berhak memutuskan keputusan itu kembali ke kepala sekolah yang berhak memutuskan keputusan”. Komite dan sekolah juga perlu memperhatikan dalam hal pengamanan siswa, pengawasan pasca-pembelajaran, serta ketertiban lingkungan sekolah. Hal ini penting mengingat SMP Negeri 26 berada di kawasan yang memiliki dinamika sosial cukup tinggi, sehingga peran komite dalam menjaga keteraturan lingkungan sangat dibutuhkan.

Sementara itu, Ketua Komite Sekolah menjelaskan bahwa keterlibatan mereka juga mencakup pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan untuk siswa miskin seperti Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Medan. Dalam pelaksanaannya, pihak sekolah memberikan ruang kepada komite untuk mengusulkan nama-nama siswa yang layak menerima bantuan berdasarkan observasi langsung terhadap kondisi sosial

ekonomi siswa di lingkungan masing-masing. Meskipun data awal berasal dari wali kelas, namun keterlibatan komite dianggap penting untuk memverifikasi dan memperluas cakupan pendataan agar bantuan benar-benar sampai kepada siswa yang tepat sasaran. Dalam aspek perencanaan program sekolah dan penyusunan anggaran, keterlibatan komite sangat nyata. Komite tidak hanya diberi informasi, tetapi juga menandatangani dokumen perencanaan dan anggaran sebagai bentuk legalitas. Tanpa persetujuan komite, sekolah tidak dapat melanjutkan proses pengajuan dana ke dinas pendidikan. Ketua komite secara tegas menyatakan bahwa jika ada poin dalam dokumen yang tidak sesuai, mereka memiliki hak untuk menolak menandatangani sampai dilakukan klarifikasi atau revisi oleh pihak sekolah. Proses ini mencerminkan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang baik antara sekolah dan komite.

Dapat Peneliti simpulkan, bahwasannya komite sekolah memiliki peran penting dalam mewadahi aspirasi masyarakat serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Keterlibatan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Melalui fungsi ini, komite sekolah dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana di satuan pendidikan. Dengan demikian, pelibatan komite sekolah tidak hanya memperkuat kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara menyeluruh.

Dalam hal penyampaian aspirasi dan kritik, komite diberikan ruang secara terbuka. Mereka berhak menyampaikan pendapat, bahkan melakukan kritik terhadap kebijakan atau program sekolah. Namun, penentuan akhir tetap menjadi wewenang pihak sekolah. Jika terjadi ketidaksepakatan serius, maka akan dilakukan diskusi lanjutan atau eskalasi ke dinas pendidikan sebagai bentuk penyelesaian yang profesional. Dari sisi kepemimpinan dan keberlanjutan, Ketua Komite saat ini telah menjabat dalam waktu yang cukup panjang. Meskipun secara teknis masa jabatan komite tidak disebutkan secara eksplisit dalam juknis, pergantian jabatan dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan orang tua siswa. Karena Ketua Komite saat ini dinilai masih layak, aktif, dan memiliki dedikasi tinggi, maka masyarakat masih mempercayakan jabatan tersebut kepadanya, meskipun anak-anaknya sudah tidak lagi bersekolah di SMP Negeri 26. Ketua Komite juga diketahui memiliki latar belakang pendidikan yang baik (sarjana hukum) serta pengaruh sosial yang kuat di lingkungan Pulau Cicanang, sehingga posisinya dianggap relevan untuk terus berkontribusi terhadap sekolah. Adapun dari perspektif guru dan tenaga pendidik lainnya, keberadaan komite sekolah memberikan dampak positif terhadap hubungan sekolah dengan masyarakat. Komite dianggap mampu menjembatani komunikasi dua arah antara orang tua dan pihak sekolah, sekaligus memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap proses pendidikan yang berlangsung.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa komite sekolah di SMP Negeri 26 Medan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung mutu pendidikan, baik secara struktural maupun kultural. Peran tersebut mencakup pemberi masukan kebijakan, pengawas sosial, fasilitator komunikasi, hingga pelindung nilai-nilai gotong royong di tengah masyarakat sekolah. Keterlibatan aktif ini menjadi model ideal bagaimana semestinya peran komite sekolah dijalankan dalam konteks penguatan tata kelola pendidikan yang demokratis dan partisipatif.

## Pembahasan

### Peran Komite Sekolah

#### a. Pengertian Komite Sekolah

Salah satu bentuk nyata dari keterlibatan masyarakat dalam pendidikan adalah melalui pembentukan sebuah badan pendamping yang terdiri dari para pemangku kepentingan pendidikan. Organisasi ini telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Awalnya dikenal sebagai Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), organisasi ini mengalami beberapa kali perubahan hingga akhirnya dinamakan Komite Sekolah. Perubahan dari BP3 menjadi Komite Sekolah/Madrasah dilatarbelakangi oleh pentingnya pelibatan aktif seluruh unsur masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan pembentukan komite ini adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap pelaksanaan dan peningkatan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan (Bisri, 2020).

Komite Sekolah merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai wadah bagi partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, baik prasekolah, sekolah formal, maupun pendidikan luar sekolah (Pandoyo & Wuradji, 2015). Pembentukan Komite Sekolah menjadi solusi atas kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite sekolah turut menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembelajaran dengan berperan sebagai perwakilan orang tua siswa. Segala keluhan yang diterima disampaikan oleh kepala atau wakil kepala sekolah kepada para guru dalam rapat internal, misalnya terkait banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa. Selain itu, komite juga terlibat secara langsung dalam pengawasan melalui kunjungan ke sekolah selama hari aktif guna memantau proses pembelajaran dan fasilitas pendukung yang tersedia (Irawan et al., 2021).

Segala aktivitas yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan mencerminkan upaya terencana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Aktivitas tersebut mencakup aspek manajerial seperti pengorganisasian, perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi, pengawasan, hingga kepemimpinan. Keterlibatan komite sekolah dan masyarakat dalam proses pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan (Basith & Rahmawati, 2020).

#### b. Peran Komite Sekolah

Dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan, komite sekolah memiliki sejumlah peran strategis yang dijalankan oleh setiap anggotanya, yaitu:

##### 1. Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory*)

Komite berperan memberikan saran dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan pendidikan, program kerja, RAPBS, standar kinerja, kriteria tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, serta isu lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

##### 2. Sebagai Pendukung (*Supporting*)

Dalam peran ini, komite mendorong partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam dunia pendidikan, menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan pendidikan, serta menumbuhkan kepedulian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

3. Sebagai Pengawas (*Controlling*)  
Komite berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, program-program sekolah, dan hasil akhir pendidikan.
4. Sebagai Mediator  
Peran ini memungkinkan komite menjembatani hubungan antara sekolah dan masyarakat, menyerap dan menganalisis aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, serta menjalin kerja sama untuk mendukung kegiatan sekolah (Hasbullah, 2006: 97–99).

## **Pengambilan Keputusan Dalam Pendidikan**

### **a. Pengertian Pengambilan Keputusan**

Manusia dalam menjalani kehidupan pasti akan menghadapi berbagai permasalahan. Dalam konteks ekonomi, khususnya ketika merumuskan tujuan, visi, dan misi organisasi, individu senantiasa dihadapkan pada sejumlah pertanyaan mendasar seperti “mengapa, siapa, bagaimana, apa, dan kapan.” Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya persoalan yang perlu diselesaikan untuk mencapai sasaran organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ilmu pengambilan keputusan hadir sebagai pendekatan filosofis dan metode analisis yang menyatukan berbagai sudut pandang secara ilmiah dan sistematis. Tujuannya adalah membantu pengambil keputusan dalam memilih satu alternatif terbaik dari berbagai opsi yang tersedia, yang bisa mengarah pada hasil yang berbeda-beda (Sriyono & SE, 2020).

Pengambilan keputusan dikategorikan sebagai ilmu karena melibatkan metode atau pendekatan tertentu yang tersusun secara sistematis, terarah, dan teratur (Rohmatul Fitri, 2015). Proses ini adalah bentuk pemilihan di antara berbagai tindakan alternatif demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Idealnya, keputusan dijalankan tanpa kekerasan fisik, melainkan melalui contoh perilaku yang baik, sehingga pelaksana merasa senang menjalankan keputusan tersebut. Prosesnya meliputi pendekatan sistematis terhadap persoalan melalui pengumpulan data yang diolah menjadi informasi, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan (Muhyadi, 2015).

Menurut Stoner (2020), keputusan diartikan sebagai tindakan memilih dari berbagai alternatif yang ada. Ia menggambarkan keputusan sebagai hukum dari suatu situasi, di mana jika seluruh fakta telah diketahui dan semua pihak bersedia menaati aturan tersebut, maka keputusan akan berjalan sebagai bentuk pelaksanaan otoritas situasional, bukan sekadar perintah. Dalam pengertian ini, keputusan berarti pilihan dari dua atau lebih kemungkinan (Pasolong, 2023). Hasan (2014) menjelaskan bahwa teori pengambilan keputusan merupakan sekumpulan teknik atau pendekatan yang digunakan dalam proses memilih alternatif terbaik. Pendekatan ini banyak diaplikasikan tidak hanya dalam manajemen produksi dan operasional seperti analisis produk, tetapi juga dalam setiap konteks manajerial yang memerlukan keputusan. Teori ini mempelajari bagaimana memilih alternatif yang tepat dan berhubungan dengan perilaku manusia dalam mengambil keputusan.

Lebih lanjut, teori ini menyatakan bahwa individu memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan biasanya bertindak berdasarkan persepsi terhadap situasi yang dihadapi. Setiap individu memiliki struktur pengetahuan yang berbeda, yang pada gilirannya memengaruhi cara mereka membuat keputusan. Proses ini tidak bisa

dilepaskan dari konteks sosial maupun pendidikan. Ketika keputusan menyangkut kepentingan pribadi, pengambilan keputusan sering kali tidak lagi bersifat rasional. Fenomena ini dikenal dengan istilah *\*self-fulfilling prophecy\**, di mana seseorang mengharapkan orang lain bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks organisasi, seseorang yang khawatir terhadap reputasinya bisa saja memberikan pendapat yang diplomatis agar tidak memperburuk kondisi organisasi (Muhyadi, 2015).

b. Teori-teori Pengambilan Keputusan

Beberapa teori yang umum digunakan dalam pengambilan keputusan antara lain:

1. Teori Utilitarisme

Teori ini berasal dari kata Latin *"utilis"* yang berarti "berguna". Utilitarisme menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang, bukan hanya untuk individu tertentu.

2. Teori Deontologi

Berbeda dari utilitarisme, teori ini menekankan pada kewajiban moral. Suatu tindakan dinilai benar jika sesuai dengan prinsip moral atau kewajiban yang berlaku, tanpa melihat hasil akhirnya.

3. Teori Hedonisme

Hedonisme merupakan pandangan yang menempatkan kesenangan dan kenikmatan duniawi sebagai tujuan hidup utama. Segala hal yang mendatangkan kepuasan jasmani, materiil, atau intelektual dianggap sebagai nilai tertinggi.

4. Teori Eudemonisme

Eudemonisme berasal dari kata Yunani *"eudaimonia"* yang berarti kebahagiaan. Teori ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati dicapai melalui kehidupan yang bermoral dan penuh kebajikan. Dalam pandangan ini, kualitas moral seseorang diukur dari tindakannya yang mencerminkan keutamaan (Ummah, 2019).

## Konsep Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Di era penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan terfasilitasi melalui lembaga bernama komite sekolah. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok, yang mendorong mereka untuk memberikan sumbangsih terhadap pencapaian tujuan kelompok serta turut memikul tanggung jawab atas keberhasilannya (A. Suryana, 2023). Menurut Davis, partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: (1) partisipasi sukarela yang terjadi secara spontan atau melalui penyuluhan, dan (2) partisipasi yang bersifat paksaan, yang muncul sebagai akibat dari tekanan hukum, kondisi sosial ekonomi, atau kebiasaan masyarakat. Dalam definisi partisipasi ini terkandung tiga elemen penting, yaitu keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab. Selain itu, partisipasi memerlukan kerja sama antarpihak, di mana setiap individu perlu mewujudkan potensi dirinya secara optimal. Tipologi partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua jenis: partisipasi kuantitatif, yang merujuk pada seberapa sering masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan partisipasi kualitatif, yang merujuk pada kualitas atau tingkat

keterlibatannya. Jenis partisipasi ini juga dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu partisipasi mandiri (inisiatif sendiri), partisipasi karena dimobilisasi, dan partisipasi simbolik atau seremoni (Mulyasa, 2003: 170-171).

Komite sekolah berfungsi sebagai saluran komunikasi strategis dalam memperkuat peran serta masyarakat dan sekolah dalam merumuskan, membahas, menetapkan keputusan, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program pendidikan (Zulkifli, 2015). Lembaga ini bersifat otonom dan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah seluruh stakeholder pendidikan di lingkungan sekolah. Komite sekolah berperan sebagai mitra dalam berbagai kegiatan pendidikan, dengan menyadari pentingnya kolaborasi antara sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Masyarakat sekitar pun diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan potensi sekolah sesuai harapan siswa dan masyarakat (Mulyasa, 2003: 172).

#### b. Manfaat Partisipasi

Partisipasi masyarakat memiliki sejumlah manfaat signifikan, salah satunya adalah menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab. Ketika masyarakat turut serta dalam kegiatan publik, mereka akan lebih memahami dan mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Selain itu, keterlibatan aktif juga akan meningkatkan proses pembelajaran individu karena pengalaman partisipasi memberikan rasa percaya diri untuk lebih berkontribusi. Partisipasi juga membantu mengatasi perasaan terisolasi; dengan terlibat dalam kegiatan masyarakat, seseorang akan merasa menjadi bagian dari komunitas. Lebih jauh, partisipasi memungkinkan terwujudnya distribusi hasil pembangunan yang lebih merata, karena lebih banyak kepentingan yang diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan (N. Suryana et al., 2022).

#### c. Bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam tiga bentuk utama:

1. Partisipasi Pikiran, yang muncul ketika masyarakat dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, pencarian solusi alternatif, serta perencanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Partisipasi Tenaga, yang terwujud dalam keterlibatan langsung masyarakat pada tahap pelaksanaan program.
3. Partisipasi Uang, yang biasanya muncul ketika suatu program mengalami kekurangan dana, dan masyarakat memberikan sumbangan finansial untuk membantu keberlangsungan kegiatan.

#### **D. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peran serta komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan di SMP Negeri 26 Medan telah berjalan cukup efektif dan memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah tidak hanya berfungsi secara administratif, melainkan terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas strategis, seperti memberikan masukan terhadap kebijakan dan program sekolah, merumuskan dan menyetujui anggaran, menyalurkan bantuan sosial, serta menjadi jembatan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Keterlibatan ini mencerminkan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan secara ideal, di mana komite mengambil peran penting dalam memberikan dukungan, masukan, dan pengawasan demi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan berkualitas. Dengan keikutsertaan tersebut, komite sekolah berperan dalam membangun tata kelola pendidikan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan berfokus pada peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basith, A., & Rahmawati, I. (2020). Pengaruh Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. *J-Mpi*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v5i1.8611>
- Bisri, A. M. (2020). Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah dalam Mengawal Kualitas Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 51–64. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31>
- Hasbullah.(2006).*Otonomi Pendidikan,Kebijakan Otonomi Daerah, dan implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Irawan, E., Nurhadi, N., & Yuhastina, Y. (2021). Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Studi pada SMP Negeri 1 Surakarta. *Jipsindo*, 8(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i1.38533>
- Miles Matthew B.Huberman Michael A.1992.*Qualitative Data Analysis:A Sourcebook of New Methods*.Beverly Hills:Sage Publicatin
- Mulyasa, E.2017. *Manajemen Berbasis Sekolah:Konsep,Strategi,dan Implementasi* Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhyadi, M. (2015). Teknik Pengambilan Keputusan. *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*, 3(2). <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v3i2.3796>
- Nursanti, R., Dwikurnaningsih, Y., & Mawardi, M. (2020). Evaluasi Kinerja Komite Sekolah di Sekolah Dasar Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 73–85. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2020.v7.i1.p73-85>
- Pandoyo, R., & Wuradji, W. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Guru, Komite Sekolah Terhadap Keefektifan Sdn Se-Kecamatan Mlati. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 3(2), 250–263. <https://doi.org/10.21831/amp.v3i2.6341>
- Pasolong, D. H. (2023). Teori Pengambilan Keputusan. In *Penerbit Alfabeta, Bandung*
- Rohmatul Fitri. (2015). Pengambilan Keputusan. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/597>
- Rosnani, L. (2021). Peran dan Keterlibatan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 293–300. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.4368>
- Septiana, D. N., Bafadal, I., & Kusumaningrum, D. E. (2018). Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 293–301. <https://doi.org/10.17977/umo27v1i32018p293>
- Sriyono, D. M., & SE, H. M. K. (2020). Buku Ajar Mata Kuliah. In *Umsida Press Sidoarjo Universitas* (Vol. 1, Issue 1).
- Suryana, A. (2023). Partisipasi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 3(2), 337–349. <https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3639>
- Suryana, N., Mumuh, M., & Hilman, C. (2022). Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2),

61-67. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.219>

Sugiono.(2012).*Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D Bandung:Alfabeta*

Ummah,M.S(2019) Teknik Pengambilan Keputusan.*In Sustainability (Switzerland)*.Vol.11,No 1

Zamroni.(2007).*Meningkatkan Mutu Sekolah,Teori Strategi dan Prosedur*. Jakarta:PSAP Muhammadiyah.